

1. Praktek transaksi dalam jual beli melalui mesin otomatis yang secara tradisional kurang terpenuhi sejumlah rukun dan syarat.
2. Penerapan akad dengan harus dan tidaknya *ij b* dan *q bul* secara lisan dalam transaksi jual beli melalui mesin otomatis.
3. Kurang terpenuhinya Hak dan kewajiban penjual atau pelaku usaha dalam transaksi jual beli melalui mesin otomatis.
4. Kurang terpenuhinya Hak dan kewajiban pembeli atau konsumen dalam transaksi jual beli melalui mesin otomatis.
5. Klausula baku (*standardize clause*)¹³ yang potensial merugikan konsumen karena tak memiliki pilihan selain menerimanya.
6. Bentuk perlindungan hukum konsumen yang membeli barang melalui mesin otomatis *Vending machine*.
7. Pendapat konsumen mengenai transaksi dalam jual beli melalui mesin otomatis
8. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme jual beli melalui mesin otomatis.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, maka penulis membatasi penelitian ini yakni mekanisme transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis di Universitas 17 Agustus Surabaya yang kemudian ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Perjanjian baku adalah perjanjian yang baik isi, bentuk, maupun cara penutupannya dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha, tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya, biasanya konsumen, 260. Johannes Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia dalam Sukarmi, S. H. *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia)*. (Jakarta, www.tokobukuonline.com-TBO. TT), 128

Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Barang Promo di Sophie Martin BC Kho Pwee Bing Surabaya”. Di sini yang dibahas adalah mengenai ketentuan barang promo dalam praktek jual belinya. Dalam skripsi tersebut diperoleh hasil bahwa menurut hukum islam, jual beli barang promo di Sophie Martin BC Kho Pwee Bing itu sah karena tingkat resiko yang merugikan konsumen lebih kecil atau *mudh ratnya* lebih sedikit daripada manfaatnya dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Begitu pula dari segi UUPK, jual beli barang promo di Sophie Martin BC Kho Pwee Bing telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPK karena pihak Sophi Martin telah memberikan informasi mengenai karakteristik suatu barang yang dijual dan memberikan ganti rugi kepada konsumen yang tidak mendapatkan barang yang telah dipesannya.¹⁷

Dalam skripsi sebelumnya juga pernah di bahas mengenai jual beli melalui telepon seluler yang dibahas oleh Ozi Nofandi tahun 2013 dengan judul “Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayar Pada PT XL Axiata Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. pemakaian jasa telekomunikasi jika terjadi kerugian terhadap konsumen, konsumen berhak mendapatkan penggantian dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun konsumen sulit mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha dikala mengalami kerugian yang dialami konsumen pengguna jasa kartu prabayar yang disediakan oleh PT XL Axiata Tbk Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini yaitu, konsumen

¹⁷ Mariyatul Qibtiyah. “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Barang Promo di Sophie Martin BC Kho Pwee Bing Surabaya”. (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, hak sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, terutama hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dari pelaku usaha jika konsumen mengalami kerugian. Penyelenggara telekomunikasi memberikan sarana dan perlindungan konsumen seperti pemberian kompensasi dan ganti rugi sebagai upaya perlindungan konsumen kepada konsumen yang terbukti dirugikan, pelaku usaha juga mempunyai hak untuk membuktikan kerugian yang dialami konsumen, dan pelaku usaha menyelenggarakan layanan Customer Service, Info Customer, Web XL, E-mail, dan melalui sarana Facebook dan Twitter namun layanan tersebut tidak menjamin memberikan ganti rugi. dan yang menjadi penghambat perlindungan konsumen adalah, kurang jelas informasi mengenai layanan konsumen, layanan yang diberikan kurang efektif untuk upaya pelaksanaan perlindungan konsumen walau disediakan sarana dan fasilitas, konsumen sulit menghubungi layanan Info Customer XL. Sehingga konsumen kesulitan untuk melakukan ganti rugi kepada pelaku usaha dan konsumen harus lebih peka terhadap apa-apa saja yang menjadi haknya.¹⁸

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara David Setiawan mengenai transaksi jual beli melalui *vending machine* hanya membahas tentang sighthat yang di ucapkan ketika pada saat melakukan transaksi tersebut apakah sah atau tidak bila di tinjau dari segi pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i sedangkan berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi ini, penulis membahas tentang transaksi jual beli minuman

¹⁸ Ozi Nofandi. "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayar pada PT XL Axiata Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". (Skripsi--IAIN Sultan Syrief, Riau, 2013).

